

RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA

AKD: RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA

Bulan: Agustus 2020

Oleh:

GAMBAR

## **PERPUSTAKAAN DPR RI**

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: [perpustakaan@dpr.go.id](mailto:perpustakaan@dpr.go.id)

Web: [perpustakaan.dpr.go.id](http://perpustakaan.dpr.go.id)

**KUHP** atau **Kitab Undang-undang Hukum Pidana** adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil [di Indonesia](#). KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum [kolonial Belanda](#), yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II [UUD 1945](#) yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: "Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden." Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: "Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia." Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Pidana?veaction=edit&ion=1](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana?veaction=edit&ion=1)

Seiring dengan perkembangan didalam negara Indonesia maka berbagai permasalahan-permasalahan baru terus ada bermunculan. Untuk mengatasi hal tersebut rancangan undang-undang yang baru banyak diajukan guna mengontrol dan mengatasi segala permasalahan yang menyangkut kepentingan semua rakyat Indonesia.

melihat permasalahan yang ada DPR akan melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020, bersama 36 RUU lainnya. Keputusan tersebut, berdasarkan hasil sidang rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun 2019-2020 yang dihadiri 96 anggota dewan secara fisik dan 226 secara virtual.

RUU KUHP masuk Prolegnas 2020 dan kemungkinan besar akan disahkan karena sudah disetujui di Tingkat I. RUU KUHP di-carry over dari DPR 2014-2019 sehingga tidak dikaji dari nol agar tidak mengalami pemborosan anggaran.

JENIS	KETERANGAN	URL
Jurnal	Perluasan Pelaku Perzinaan Dalam Revisi KUHP	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=268\n55&amp;keywords=kuhp">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=268\n55&amp;keywords=kuhp</a>
Buku	Het Wetboek van Strafrecht: Tweede Druk	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=341\n50&amp;keywords=kuhp">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=341\n50&amp;keywords=kuhp</a>
Buku	Indonesian Law	<a href="https://ebookcentral.proquest.\ncom/lib/dpr-ebooks/detail.acti\non?docID=5490759">https://ebookcentral.proquest.\ncom/lib/dpr-ebooks/detail.acti\non?docID=5490759</a>
Buku	Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=197\n44&amp;keywords=kuhp">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=197\n44&amp;keywords=kuhp</a>
Buku	KUHP dan KUHP: Dilingkupi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=298\n79&amp;keywords=kuhp">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=298\n79&amp;keywords=kuhp</a>
Buku	KUHP Khusus: kompilasi ketentuan pidana dalam uu pidana khusus	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=222\n42&amp;keywords=kuhp">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=222\n42&amp;keywords=kuhp</a>
Buku	Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=131\n81&amp;keywords=kuhp">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=131\n81&amp;keywords=kuhp</a>
Buku	Tindak Pidana Makar Menurut KUHP	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=220\n87&amp;keywords=kuhp">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=220\n87&amp;keywords=kuhp</a>
Buku	Verklaring van de Nederlandsch Indische Strafwetboeken	<a href="http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=341\n36&amp;keywords=kuhp">http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&amp;id=341\n36&amp;keywords=kuhp</a>
Surat kabar	Aktivis Desak Prioritaskan RUU PKS	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39693">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39693</a>
Surat kabar	Ancaman Kebebasan dalam Rancangan KUHP: Sanksi Pidana Korupsi Dikurangi	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39400">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39400</a>
Surat kabar	Atur strategi perjuangkan RUU PKS	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39675">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39675</a>
Surat kabar	Definisi Makar di KUHP Dinilai Terlalu Luas	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/8480">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/8480</a>
Surat kabar	Dewan Prioritaskan RUU Warisan Periode Lalu	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/37798">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/37798</a>
Surat kabar	DPR Lanjutkan Bahas RKUHP	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39360">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39360</a>
Surat kabar	DPR Prioritaskan Rancangan Undang-Undang Kontroversial	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/38307">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/38307</a>
Surat kabar	DPR sahkan 248 Undang-undang masuk program legislasi nasional	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/38035">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/38035</a>
Surat kabar	DPR Segera Bersurat ke Presiden	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39398">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39398</a>
Surat kabar	DPR-Pemerintah Belum Sepakat, Pasal LGBT dalam RKUHP Ditunda	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/9477">https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/9477</a>
Surat kabar	Empat RUU warisan masuk prolegnas prioritas	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/37949">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/37949</a>
Surat kabar	Hentikan Pembahasan RUU Bermasalah: Editorial	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39401">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39401</a>
Surat kabar	Isyarat Perlawanan Kelompok Mahasiswa	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39399">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39399</a>
Surat kabar	Kelompok Masyarakat Tuntut Keterbukaan Pemahasan	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/38306">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/38306</a>
Surat kabar	Komisi III Sebut RKUHP Beri Perlindungan Anak dan Perempuan	<a href="http://epaper.dpr.go.id/index/\n/detail/id/9109">http://epaper.dpr.go.id/index/\n/detail/id/9109</a>
Surat kabar	KORUPSI RKUHP Ancam Kerja KPK	<a href="http://epaper.dpr.go.id/index/\n/detail/id/8481">http://epaper.dpr.go.id/index/\n/detail/id/8481</a>
Surat kabar	Nasdem tolak lanjutkan pembahasan RKUHP	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39335">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39335</a>
Surat kabar	Nasib RKUHP dan RUU pas tunggu instruksi Presiden	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39396">http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/39396</a>

Surat kabar	PGI: RKUHP Soal Tindak Pidana Terhadap Agama Masih Bermasalah	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/9379">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/9379</a>
Surat kabar	Rancangan KUHP Harus Ada Definisi yang Jelas dari Frasa Penghinaan Presiden	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/8642">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/8642</a>
Surat kabar	RKUHP Ancam Demokrasi	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/8531">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/8531</a>
Surat kabar	RKUHP Pembahasan Ditunda Setelah Pemilu	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/10345">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/10345</a>
Surat kabar	RUU PKS Jangan Tumpang Tindih Dengan KUHP	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/9886">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/9886</a>
Surat kabar	Sempurnakan 14 Isu Krusial di RKUHP	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/37904">http://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/37904</a>
Surat kabar	Tarik ulur RUU Penghapusan kekerasan seksual	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/39656">http://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/39656</a>
Surat kabar	Tarik Ulur RUU PKS: Editorial	<a href="http://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/39627">http://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/39627</a>
Surat kabar	Tokoh Agama Cemaskan Isi Rancangan KUHP	<a href="https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/9385">https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/9385</a>